

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERIKANAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-NYA, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Semoga LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota ini tetap mencerminkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022.

Sarilamak, Februari 2023

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota



MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19710808 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Wewenang	2
1.3. Isu – Isu Strategis	5
1.4. Permasalahan yang dihadapi	6
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II. PRENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan	9
2.1.1. Visi	9
2.1.2. Misi	11
2.1.3. Sasaran	12
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN	14
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Targe Kinerja	14
3.2. Analisa dan Capaian Kinerja	14
3.3. Realisasi Anggaran	49
BAB IV. PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan	4
Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Perikanan	4
Tabel 1.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	6
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja 2022.....	14
Tabel 3.2. Sasaran Strategis 1	15
Tabel 3.3. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Budidaya	20
Tabel 3.4. Program dan kegiatan yang mendukung produksi tangkap	22
Tabel 3.5. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Benih Ikan	24
Tabel 3.6. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi ikan hias	27
Tabel 3.7. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi produk unggulan daerah.....	29
Tabel 3.8. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi hasil olahan perikanan	32
Tabel 3.9. Program dan Kegiatan yang mendukung Tingkat Produktivitas Perikanan	35
Tabel 3.10. Program dan Kegiatan yang mendukung Jumlah Kelompok Perikanan	40
Tabel 3.11. Program dan Kegiatan yang mendukung cakupan bina Kelompok	43
Tabel 3.12. Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat konsumsi ikan	46
Tabel 3.13. Sasaran Strategis 2	47
Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Tahun 2022	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Grafik Produksi Budidaya (Ton/ Tahun)	16
Gambar 2. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan budidaya	19
Gambar 3.3. Grafik Produksi Tangkap (Ton/Tahun)	20
Gambar 4. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan tangkap	22
Gambar 3.5. Grafik Produksi Benih Ikan (Ekor/ Tahun)	23
Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Benih	24
Gambar 3.7. Grafik Produksi Ikan Hias (Ekor /Tahun)	25
Gambar 3.8. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Ikan hias	27
Gambar 3.9. Grafik Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor)	28
Gambar 3.11. Grafik Produksi Hasil Olahan(Ton/ Tahun)	30
Gambar 3.12. Dokumentasi Kegiatan mendukung Produksi Olahan Hasil Perikanan	32
Gambar 3.13. Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/ Tahun)	33
Gambar 3.14. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung peningkatan produktifitas perikanan	34
Gambar 3.15. Jumlah Kelompok perikanan (Kelompok /Tahun)	36
Gambar 3.16. Kegiatan yang mendukung peningkatan kelompok Perikanan	39
Gambar 3.17. Persentase cakupan bina kelompok	40
Gambar 3.18. Dokumentasi kegiatan Cakupan Bina Kelompok Perikanan	43
Gambar 3.19. Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, Transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah. serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk menyusun LKjIP Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan (LKjIP) Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota bertujuan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota dalam mencapai target kinerja Tahun 2022. dan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

1.2. TUGAS DAN WEWENANG

a) Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan

b) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Dinas Perikanan mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perikanan

Fungsi :

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

c) Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat. terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah / Perencanaan
 - c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. terdiri dari:
 1. Analisis Akuakultur
 2. Pengelolaan Kesehatan Ikan
 3. Statistisi
 - d. Bidang Perlindungan Usaha Perikanan. terdiri dari:
 1. Penggerak Swadaya Masyarakat
 2. Analis Pembiayaan dan Resiko Keuangan
 3. Analisis Ketahanan Pangan
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan. terdiri dari:
 1. Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan;
 2. Analisis Pasar Hasil Perikanan
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d) SDM Pegawai /Aparatur

Jumlah aparatur Pemerintah di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 sebanyak 55 orang yang terdiri dari 20 orang PNS, 20 orang CPNS dan 35 orang Tenaga Kontrak. Sebanyak 45 orang bertugas di Kantor Dinas Perikanan dan 10 orang bertugas di UPT Balai Benih Ikan. Penyuluh Perikanan yang berjumlah 14 Orang yang terdiri dari 7 orang Penyuluh PNS dan 6 Orang Penyuluh Perikanan Bantu berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah binaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari tingkat pendidikan aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Strata 2 (S2)	5 Orang	
2	Strata 1 (SI)	32 orang	
3	Diploma III (D III)	2 orang	
4	SMU	1 Orang	
Jumlah		40 Orang	

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Perikanan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Strata 2 (S2)	-	
2	Strata 1 (SI)	12 Orang	
3	Diploma III (D III)	8 Orang	
4	SMA	11 Orang	
5	SD	4 Orang	
Jumlah		35 Orang	

1.3 ISU ISU STRATEGIS

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dan dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya ikan baik berupa alih fungsi lahan potensial budidaya
2. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
4. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberian jaminan sosial bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
5. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat
7. Meningkatnya tuntutan akan produk perikanan yang aman bagi kesehatan manusia
8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan sumber daya perikanan

9. Masih rendahnya jumlah kelompok perikanan yang aktif dan cakupan bina kelompok

1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan menghadapi permasalahan - permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya pada Tabel 1.3

Tabel 1.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Produksi dan produktivitas perikanan	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang unggul	1. Masih rendahnya jumlah luas lahan baru budidaya perikanan (skema investasi) 2. Masih rendahnya jumlah kolam baru yang dibangun 3. Masih sedikitnya jumlah bangsal pembenihan yang dibangun 4. Masih rendahnya jumlah jenis ikan lokal yang dibudidayakan 5. Masih sedikitnya jumlah obat-obatan ikan 6. Masih rendahnya jumlah demplot peningkatan kualitas air 7. Masih rendahnya jumlah pengujian sampel ikan 8. Masih rendahnya jumlah pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB dan CPIB 9. Masih rendahnya jumlah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>benih, calon induk dan pakan yang didistribusikan</p> <p>10. Masih sedikitnya jumlah pembinaan teknis yang dilakukan</p>
		<p>2. Rendahnya Jumlah kelompok Perikanan yang Aktif</p>	<p>1. Masih sedikitnya jumlah pelatihan teknis</p> <p>2. Masih sedikitnya jumlah bimbingan Teknis</p> <p>3. Masih sedikitnya jumlah temu usaha perikanan</p> <p>4. Masih rendahnya jumlah rekomendasi usaha perizinan</p> <p>5. Masih rendahnya jumlah kelompok yang teregistrasi</p> <p>6. Masih rendahnya jumlah kelompok yang dinilai</p>
		<p>3. Belum Optimalnya Produksi Tangkap dan Konsumsi Ikan</p>	<p>1. Masih rendahnya jumlah SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)</p> <p>2. Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana perikanan</p> <p>3. Masih rendahnya jumlah asuransi pembudidaya ikan</p> <p>4. Masih rendahnya jumlah fasilitasi perlindungan usaha perikanan</p> <p>5. Masih rendahnya jumlah sosialisasi gemarikan</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			6. Masih rendahnya jumlah angka konsumsi makan ikan 7. Masih rendahnya jumlah promosi penguatan daya saing

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2022 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas dan Wewenang
- 1.3. Isu isu strategis
- 1.4. Permasalahan yang dihadapi
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 1.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan
 - 1.1.1 Visi
 - 1.1.2 Misi
 - 1.1.3 Tujuan dan Sasaran
 - 1.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan
- 1.2. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- 3.2. Pengukuran Kinerja 2021
- 3.3. Analiis dan Capaian Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN

2.1.1 Visi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa mendatang. Untuk dapat mewujudkan kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dinas daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas bawah (Top-Down) dan bawah atas (Bottom-Top).

Sesuai dengan Undang-Undang di atas, maka Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun (2021-2026). Visi ini juga harus mengacu

kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan daerah, propinsi dan nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak, karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di sektor perikanan secara menyeluruh.

Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas / daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah.

Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani. Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah”

Madani adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan,

toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan Berbudaya** adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai-nilai Adat Basandi Syarak. Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat didefinisikan komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Stakeholder utama pembangunan daerah adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) dan sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani. Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah telah dirumuskan melalui 5 misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Misi diatas. maka Dinas Perikanan dengan urusan Kelautan dan Perikanan termasuk ke dalam MISI 2 : **Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional**. Pada sasaran meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan. Dinas Perikanan berperan dalam pencapaian indikator persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dalam harga berlaku. Dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kepala Daerah menetapkan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Unggulan Pembangunan Daerah. Adapun Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi
4. Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agrobisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Selanjutnya program unggulan daerah dituangkan dalam 5 misi Kepala Daerah. Dinas Perikanan melalui Misi 2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral dengan program unggulan : Pembukaan lahan baru perikanan seluas 1.000 Ha dan menghasilkan 20 juta bibit ikan perbulan.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan misi. tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERUBAHAN PENJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya produksi dan Produktifitas Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya	3.55
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi Hasil AKIP	75

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.584.787.517.-	
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 299.170.00.-	
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 3.656.725.800.-	
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 369.979.00.-	

Pada Tahun 2022 Dinas Perikanan melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran **Rp. 7.910.663.217.-**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERIKANAN

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Kinerja suatu instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran. ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, strategi dari suatu instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 menyajikan hasil analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya produksi dan Produktifitas Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB-	3,55	3,67	103,38	Sangat Tinggi
2)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi Hasil AKIP	75	63,11	84,15	Sangat Tinggi

Rata rata Capaian indicator Kinerja sangat tinggi

3.2 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja

Dinas Perikanan mengalami perubahan anggaran yaitu anggaran awal berjumlah Rp. 6.448.913.621 yang tertulis di Penetapan Kinerja 2022. Pada perubahan Anggaran bertambah menjadi Rp. 7.910.663.217

Berikut gambaran pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran strategis beserta analisisnya :

1. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB

Tahun 2022 Target Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Dinas Perikanan adalah 3.55 %. Dari hasil perhitungan yang dirilis BPS realisasi Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB melebihi target. Dimana realisasinya adalah sebesar 3.67 % dengan tingkat capaian 103.38 %. Untuk mendukung Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB ada beberapa Faktor yang mendukung :

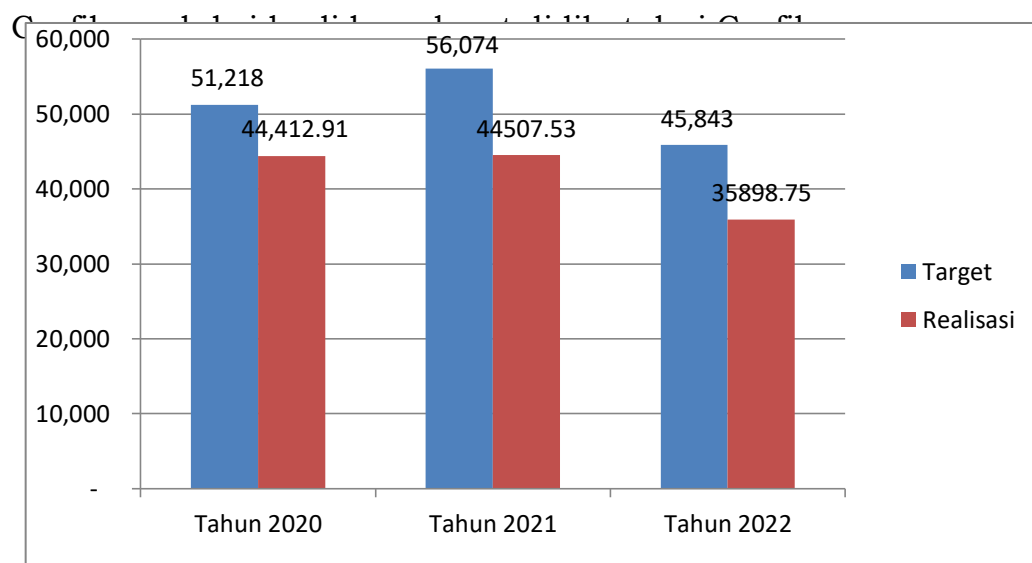
Tabel 3.2. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1							
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan							
Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB							
Faktor Pendukung	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Realisasi 2022
Produksi Budidaya (ton/thn)	56.073.83	44.507.53	51.218.40	45.081.752	45.843	35.898,73	78,31
Produksi Tangkap (ton/ha)	4.250	3.412.02	4.300	2.829.12	3.700	3.296.24	89,09
Produksi benih Ikan (ekor)	440.000.000	445.695.800	470.000.000	436.274.300	459.066.674	75.561.400	16,46
Produksi Ikan Hias	7.000.000	7.054.400	7.000.000	7.416.300	7.265.620	26.414.605	363,55
Produksi Produk Unggulan Daerah	350.000	452.000	450.000	736.500	465.560	4.060.975	872,27
Produksi hasil olahan	375	354.85	425	348.385	365	344.681	94,43
Tingkat Produktifitas	5 Ton/ Ha	4.5 Ton/ Ha	6 Ton/Ha	4.5 Ton/Ha	4.64 Ton/Ha	7.5 Ton/Ha	166,67

Sasaran Strategis 1							
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan							
Perikanan							
Jumlah Kelompok Perikanan (Kelompok)	650	638	737	666	737	705	95,65
Cakupan Bina Kelompok (%)	85	77	90	65	79	71	89,87
Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/ Kapita/ Tahun)	35 Kg/Kapita/Tahun	38 Kg/Kapita/Tahun	38.5 Kg/Kapita/Tahun	39.24 Kg/Kapita/Tahun	38.5 Kg/Kapita/Tahun	39.90 Kg/Kapita/Tahun	103.63

a. Produksi budidaya

Produksi Budidaya pada Tahun 2022 belum mencapai target yaitu 45.843 Ton dengan realisasi 35.898,73 Ton. Produksi budidaya tahun 2022 juga lebih rendah dibandingkan dengan produksi tahun 2020.



Gambar 3.1. Grafik Produksi Budidaya (Ton/ Tahun)

Dari Grafik di atas dapat dilihat terjadi peningkatan produksi pada tahun 2020 ke tahun 2021. namun terjadi penurunan pada Tahun 2022.

Perikanan Budidaya adalah usaha memelihara dan mengembangbiakan ikan. Lokasi Budidaya perikanan pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/drum, Keramba sungai, jaring apung dan minapadi (memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini

dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan paling banyak dilakukan pada Kolam air tenang, keramba sungai, KJA, Minapadi dan Saluran Irigasi.

Untuk meningkatkan Produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan sudah melakukan beberapa Kegiatan yaitu Pembinaan cara budidaya ikan yang baik, Bantuan Benih dan pakan Ikan untuk Pokdakan, Pengembangan Keramba Jaring apung, Pengembangan keramba sungai, rehab kolam Pokdakan, Pembangunan Sumur Bor dan Pembangunan Saluran air masuk dan keluar di Pokdakan, serta bantuan pakan dan benih kepada pokdakan. Belum tercapainya target produksi perikanan Budidaya disebabkan oleh ketersediaan air tidak sepanjang musim pada kolam pokdakan karena banyak kolam masyarakat yang sistem tadah hujan, sistem budidaya yang masih tradisional, mahalnya harga pakan dan juga musibah banjir.



Pemeriksaan Kualitas air kolam Pokdakan



Pemeriksaan sampel ikan



Bantuan benih



Bantuan pakan dan calon induk



Rehab Kolam Pokdakan



Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat

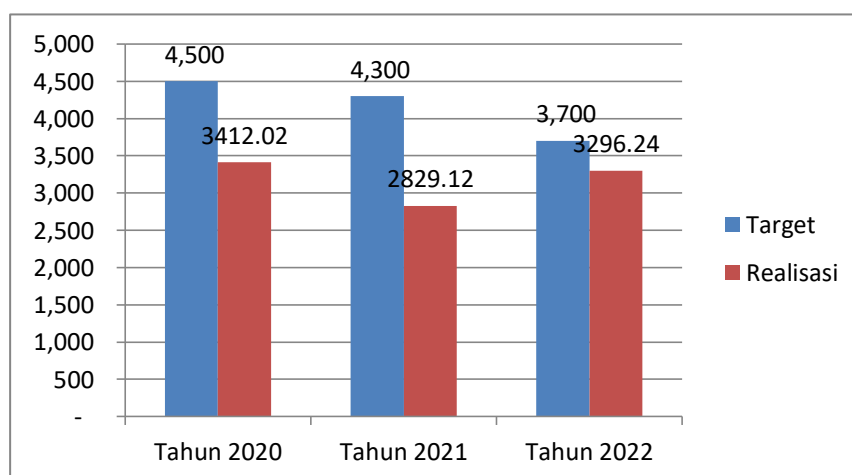
Gambar 2. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan budidaya

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Budidaya

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.022.765.800	2.730.752.284	90.34	100
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	492.875.600	491.894.000	99.80	100
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu	559.546.600	534.386.778	95.50	100
3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	108.971.288	99.06	100
4	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	33.940.000	30.622.500	90.23	100
5	Perencanaan. Pengembangan. Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.826.403.600	1.564.877.718	85.68	100

b. Produksi Tangkap

Untuk indikator jumlah produksi Perikanan tangkap yang dihasilkan pada tahun 2022 dari Target 3.700 ton masih jauh untuk mencapai target yaitu 3.296,24 ton. Dibandingkan pada Tahun 2021 dengan produksi 2.829,12 Ton terjadi peningkatan produksi. Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Gambar 3.3. Grafik Produksi Tangkap (Ton/Tahun)

Dari grafik diatas, terjadi penurunan produksi pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena hanya sebagian kecil Nelayan Penuh sedangkan sebagian besar merupakan Nelayan sambilan (hobi). Untuk mendukung hal tersebut Dinas Perikanan pada tahun 2021 melakukan pengembangan Lubuk Larangan, memberikan bantuan Perahu dan sarana alat tangkap Nelayan seperti jaring dll serta melakukan Restocking di Perairan Umum.



Bantuan benih dan pakan untuk Pokmaswas



Bantuan perahu dan mesin perahu untuk KUB

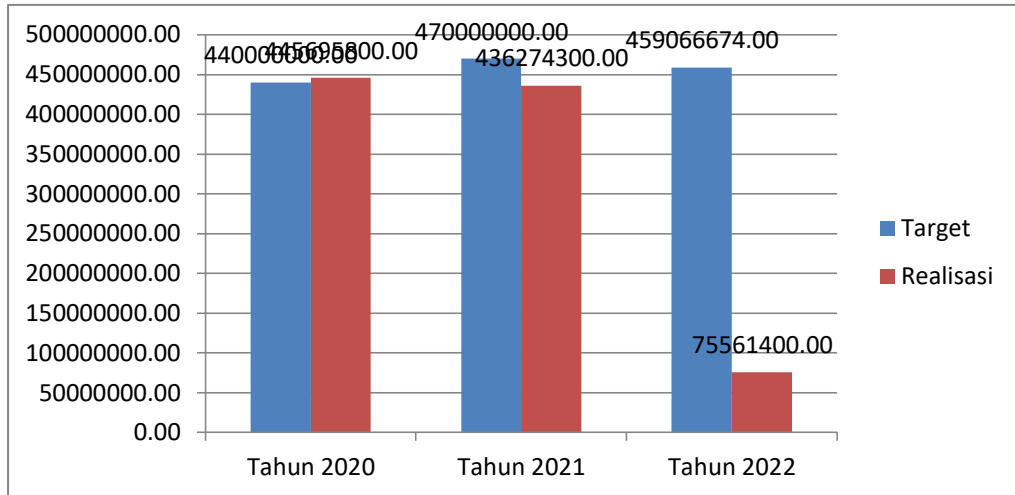
Gambar 4. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan tangkap

Tabel 3.4. Program dan kegiatan yang mendukung produksi tangkap

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	299,170,000	246,184,000	82.29	100
1	Penyediaan Prasarana Usaha perikanan Tangkap	224,170,000	172,931,000	77.14	100
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	75,000,000	73,253,000	97.67	100

c. Produksi Benih Ikan

Produksi benih ikan yang dihasilkan pada tahun 2022 belum mencapai target produksi yaitu target 459.066.674 ekor dengan realiasi 75.561.400 ekor. Terjadi penurunan produksi Benih Ikan pada tahun 2022 seperti yang terlihat pada diagram berikut ini



Gambar 3.5. Grafik Produksi Benih (Ekor/Tahun)

Dari Grafik dapat dilihat terjadi penurunan produksi benih dari tahun 2020-2022. Hal ini ini disebabkan disebabkan karena kurangnya induk ikan dan tingginya tingkat kematian benih di tingkat pendederan yang disebabkan oleh faktor perubahan lingkungan dan penyakit. Untuk menghasilkan benih ikan yang berkualitas Pada tahun 2022 Dinas Perikanan sudah memberikan calon induk ikan nila, lele, gurami dan mas untuk Unit Pembenihanan Rakyat. Selain itu juga Pengembangan Balai Benih Ikan.





Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi

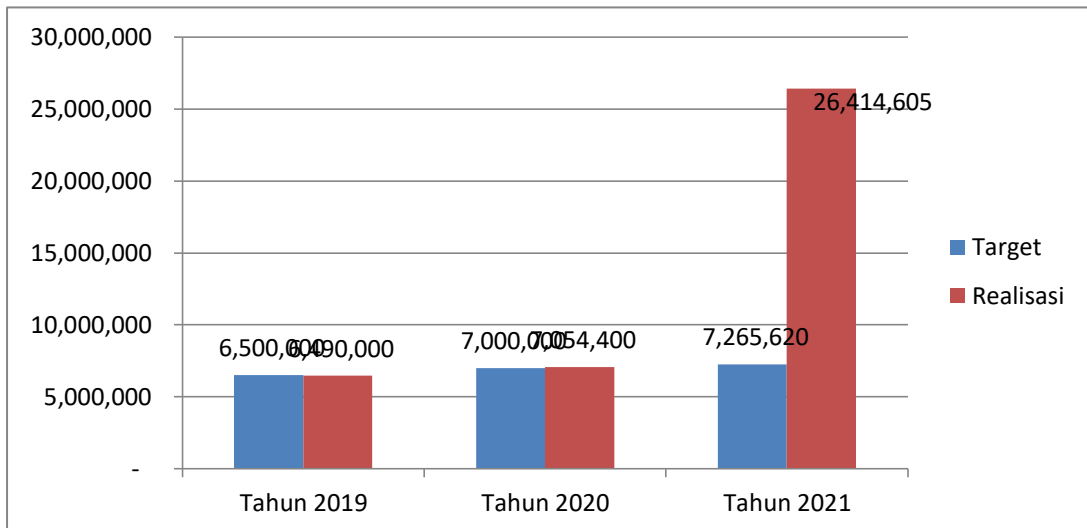
Tabel 3.5. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Benih Ikan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.022.765.800	2.730.752.284	90.34	100
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	492.875.600	491.894.000	99.80	100
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu	559.546.600	534.386.778	95.50	100
3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	108.971.288	99.06	100
4	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	33.940.000	30.622.500	90.23	100
5	Perencanaan. Pengembangan. Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.826.403.600	1.564.877.718	85.68	100

d. Produksi Ikan hias

Produksi benih ikan hias yang dihasilkan sudah melebihi target produksi yaitu target 7.265.620 ekor dengan realiasi 26.414.605 ekor. Ikan hias yang dihasilkan di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari

Unit Pembenihan Rakyat dan Hactery Ikan Hias yang di bangun oleh Dinas Perikanan. Jenis ikan hias yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Ikan Koi, Mas Koki, Ikan Komet, ikan cupang, sepat biru, black molly dan manfish



Gambar 3.7. Grafik Produksi Ikan Hias (Ekor /Tahun)

Dari Grafik diatas dapat di lihat terjadi peningkatan Produksi Ikan Hias setiap tahunnya mulai dari Tahun 2020 s.d 2022. Peningkatan produksi yang paling signifikan terjadi pada tahun 2022. Untuk mendukung peningkatan produksi ikan hias Dinas Perikanan melakukan pengadaan Calon Induk Ikan Hias untuk UPR dan Hactery Ikan Hias.





Bantuan calon induk ikan hias



Rehab Hatchery Ikan Hias

Gambar 3.7. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Ikan Hias

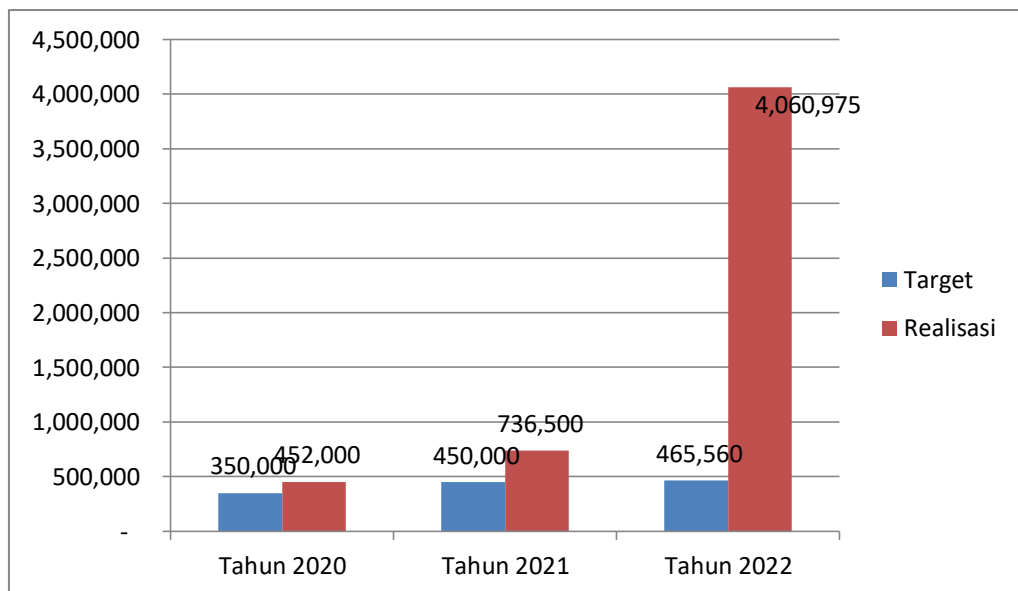
Tabel 3.6. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi ikan hias

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.022.765.800	2.730.752.284	90.34	100
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	492.875.600	491.894.000	99.80	100
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu	559.546.600	534.386.778	95.50	100
3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	108.971.288	99.06	100
4	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	33.940.000	30.622.500	90.23	100
5	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.826.403.600	1.564.877.718	85.68	100

e. Produksi Produk Unggulan Daerah

Produksi Produk Unggulan Daerah adalah ikan gurami sago. Ikan Gurami Sago sudah di rilis oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/ Kepmen-KP/2017 tentang Pelepasan Ikan Gurami Sago. Pada Tahun 2017 Ikan Gurami Sago sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah.

Produksi Ikan Gurami Sago meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2022 dengan target produksi 465.560 ekor dengan realisasi jauh melebihi target 4.060.975 ekor. Produksi Gurami Sago dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.9. Grafik Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor)

Dari grafik di atas dapat dilihat adanya peningkatan produksi setiap tahunnya. Untuk meningkatkan produksi Ikan gurami sago Dinas Perikanan sudah memberikan bantuan calon induk Gurami Sago kepada Kelompok Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) setiap tahunnya.





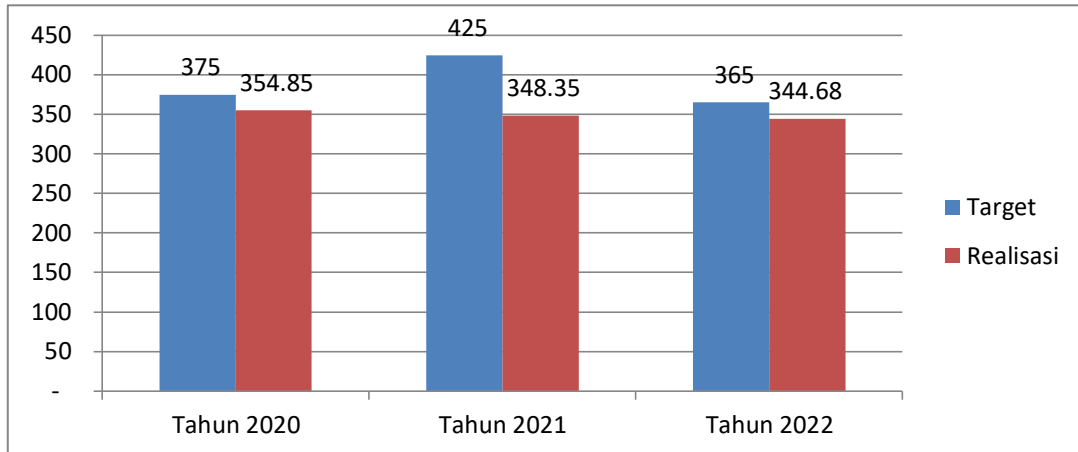
Gambar 3.10. Dokumentasi Kegiatan mendukung produksi Gurami Sago

Tabel 3.7. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi produk unggulan daerah

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.022.765.800	2.730.752.284	90.34	100
1	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu	559.546.600	534.386.778	95.50	100

f. Produksi hasil olahan

Produksi olahan hasil perikanan Tahun 2022 adalah 344,681 ton dengan target 365 ton. Dibandingkan Tahun 2021 dengan realisasi 348,35 ton terjadi penurunan produksi. Produksi olahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 3.11. Grafik Produksi Hasil Olahan (Ton/Tahun)

Dari Grafik di atas dapat dilihat terjadi penurunan produksi dari tahun 2020 ke tahun 2022. Penurunan produksi ini disebabkan karena pengaruh Pandemi Covid 19. Selain itu, persaingan pasar yang tidak sehat juga mempengaruhi terjadinya penurunan produksi ini. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perikanan telah memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok pengolahan perikanan.





Pembinaan Poklashar



Kegiatan pengasapan ikan

Gambar 3.12. Dokumentasi Kegiatan mendukung Produksi Olahan Hasil Perikanan

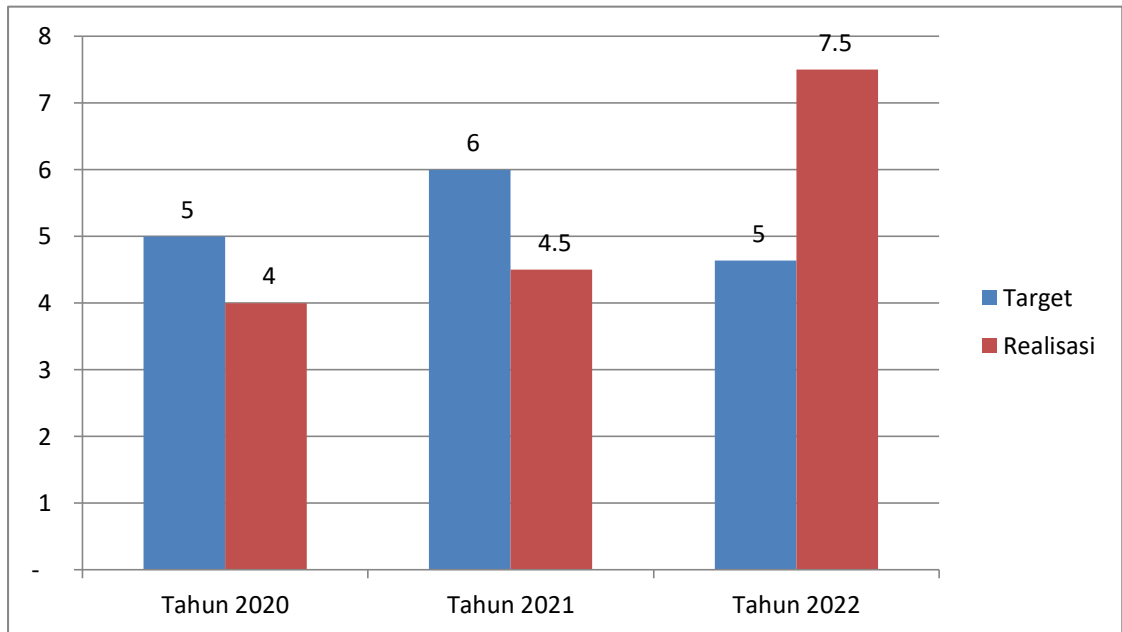
Tabel 3.8. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi hasil olahan perikanan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	369,979,900	313,928,328	84.85	100
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	254,629,000	200,342,000	78.68	100
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	254,629,000	200,342,000	78.68	100
	Kegiatan Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	115,350,900	113,586,328	98.47	100
1	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	115,350,900	113,586,328	98.47	100

g. Tingkat Produktifitas Perikanan

Tingkat capaian indikator kinerja Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya tahun 2022 sudah mencapai target yaitu 7.5 ton/Ha. dari Target 4.64 ton/Ha. Peningkatan Produktifitas didukung

oleh kegiatan Ektensifikasi dan Intensifikasi. Tingkat produktifitas dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 3.13. Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/ Tahun)

Untuk meningkatkan produktifitas dilakukan dengan cara Extensifikasi dan Intensifikasi. Kegiatan Ektensifikasi Pada tahun 2021 dengan Pemanfaatan Escavator untuk membuka Lahan Baru.

Untuk kegiatan Intensifikasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pembudidaya ikan untuk melaksanakan kegiatan perikanan dari sistem tradisional menjadi intensif dengan memanfaatkan teknologi yang ada, Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi seperti demplot percontohan, Penerapan CPIB (Cara pembenihan Ikan yang baik) dan CBIB (Cara Budidaya ikan yang baik) kepada Pembudidaya ikan.





Extensifikasi kolam baru dengan memanfaatkan escavator



Bimtek CPIB

Gambar 3.14. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung peningkatan produktifitas perikanan

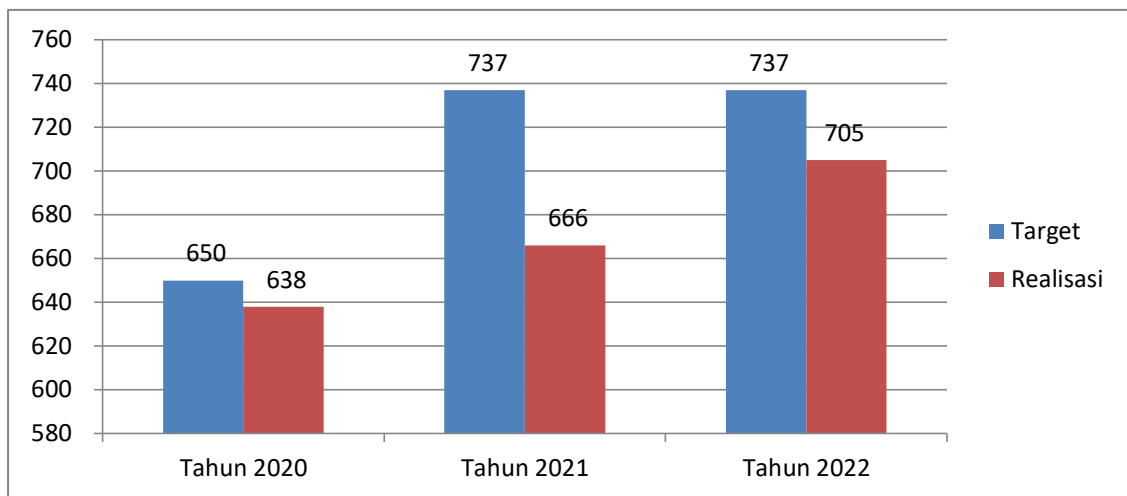
Tabel 3.9. Program dan Kegiatan yang mendukung Tingkat Produktivitas Perikanan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	592,644,400	528,932,900	89.25	100
1	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	254,629,000	200,342,000	78.68	100
2	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	293,535,000	284,330,500	96.86	100
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	44,480,400	44,260,400	99.51	100
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.022.765.800	2.730.752.284	90.34	100
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	492.875.600	491.894.000	99.80	100
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu	559.546.600	534.386.778	95.50	100
3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	108.971.288	99.06	100
4	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	33.940.000	30.622.500	90.23	100
5	Perencanaan. Pengembangan. Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.826.403.600	1.564.877.718	85.68	100

h. Jumlah Kelompok Perikanan

Tingkat capaian indikator kinerja Jumlah Kelompok Perikanan pada Tahun 2022 tidak mencapai target yaitu 705 kelompok, dari Target 737 kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari Pokdakan,

Pokmaswas, Poklahsar dan KUB. Peningkatan jumlah kelompok perikanan dapat dilihat dari grafik di bawah ini :



Gambar 3.15. Jumlah Kelompok Perikanan

Dari Grafik diatas dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah kelompok perikanan setiap tahunnya mulai dari tahun 2020-2022. Meskipun realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Kelompok yang mendapatkan binaan terdiri dari Pokdakan, Pokmaswas, Poklahsar dan KUB. Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) adalah: Kumpulan para pembudidaya ikan yang terbentuk dan tumbuh atas dasar adanya kepentingan bersama dengan rasa saling percaya, keserasian dan keakraban untuk bekerjasama dalam rangka memanfaatkan sumberdaya, mengembangkan usaha, daa, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pokdakan di Kabupaten Lima puluh kota tersebar di seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sampai akhir tahun 2022 Pokdakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 596 kelompok. Kegiatan yang di lakukan oleh Pokdakan adalah usaha pembesaran dan pembenihan ikan.

Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas) adalah Sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya. Pokmaswas ini tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota . Jumlah Pokmaswas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak sampai tahun 2022

adalah 69 Kelompok. Pokmaswas tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil perikanan (Poklahsar) adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok. Poklahsar yang sudah terdaftar sebanyak 25 Kelompok. Poklahsar baru ada di Kecamatan Harau, Payakumbuh, Mungka, Pangkalan, Kapur IX, Guguk dan Suliki. Kegiatan yang dilakukan oleh Poklahsar adalah Pengolahan ikan Asap, Bakso Ikan, Peyek Ikan, Nugget, Burger Ikan, Dendeng Ikan, Pizza Ikan, Sosis Ikan dan Tahu Tuna.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. KUB yang sudah terdaftar terdapat di sekitar waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Kegiatan yang dilakukan oleh KUB adalah melaksanakan penangkapan ikan di Perairan Umum (Waduk PLTA Koto Panjang). Sampai akhir tahun 2022 terdapat 15 KUB yang terdaftar pada Dinas Perikanan. Pada Tahun 2019 Nelayan yang tergabung dalam KUB sudah mendapatkan Kartu Asuransi Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Untuk mendukung peningkatan jumlah kelompok perikanan. Dinas Perikanan melakukan Pembinaan baik oleh Penyuluh Perikanan maupun aparatur Dinas perikanan, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan teknis. Selain itu penyaluran bantuan dilakukan kepada kelompok bukan perorangan.





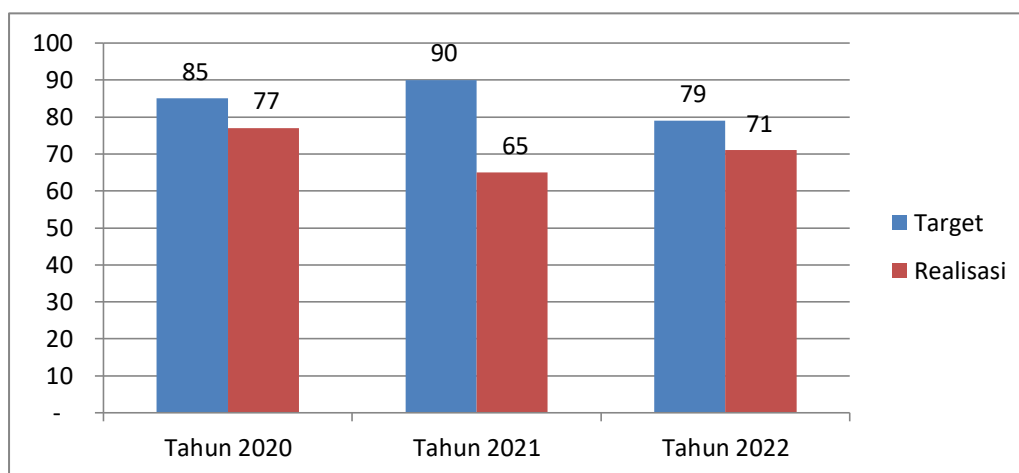
Gambar 3.16. Kegiatan yang mendukung peningkatan kelompok perikanan

Tabel 3.10. Program dan Kegiatan yang mendukung Jumlah Kelompok Perikanan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	592,644,400	528,932,900	89.25	100
1	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	254,629,000	200,342,000	78.68	100
2	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	293,535,000	284,330,500	96.86	100
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	44,480,400	44,260,400	99.51	100

i. Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Untuk indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Perikanan Tahun 2022 tidak mencapai target yaitu dari target 79% tercapai 71%. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah persentase kelompok perikanan yang tersentuh oleh program pemerintah. Selain tersentuh oleh bantuan pemerintah juga dilakukan pembinaan, monitoring dan Evaluasi secara teknis oleh Aparatur Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan.



Gambar 3.17 : Cakupan Bina Kelompok (Persentase/Tahun)

Dari grafik diatas, dapat dilihat terjadi penurunan cakupan bina kelompok dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan peningkatan di Tahun 2022. Untuk pencapaian setiap tahunnya belum mencapai target.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan adalah menyalurkan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti bantuan benih dan pakan, bantuan calon induk ikan. revitalisasi kolam rakyat, pengembangan keramba jaring apung. pengembangan keramba sungai, Minapadi, Bantuan saran dan prasarana, Gerakan pakan ikan mandiri. Bantuan yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat pengawas adalah Pengadaan benih dan pakan untuk lubuk larangan. Rehab kolam. Bantuan yang disalurkan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) adalah pengadaan alat alat pengolahan, penerbitan SKP dan kegiatan pembinaan. Sedangkan bantuan yang disalurkan kepada Kelompok usaha bersama (KUB) adalah bantuan perahu. bantuan alat tangkap. Bantuan tersebut sudah disalurkan sejak Dinas Perikanan berdiri tahun 2008. Bantuan yang sudah disalurkan tersebut ada yang berkembang dan ada juga yang tidak berkembang







Gambar 3.18. Dokumentasi kegiatan Cakupan Bina Kelompok Perikanan

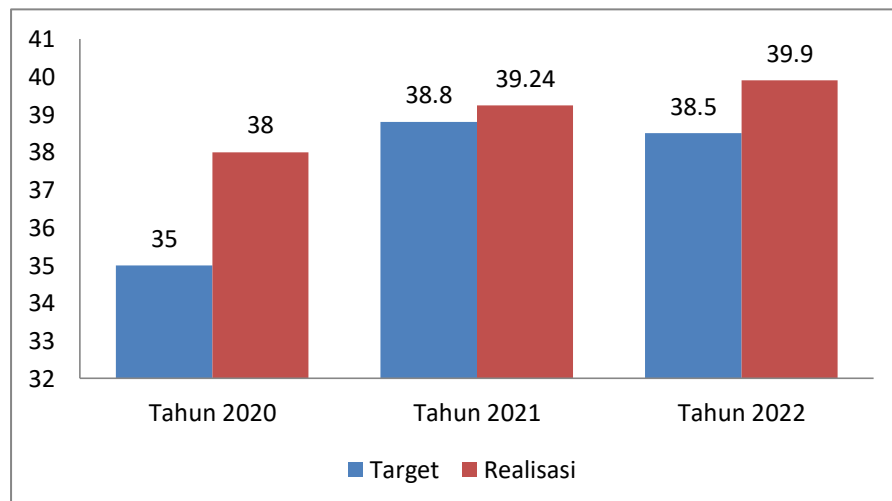
Tabel 3.11. Program dan Kegiatan yang mendukung cakupan bina kelompok

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	299,170,000	246,184,000	82.29	100
1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	224,170,000	172,931,000	77.14	100
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	75,000,000	73,253,000	97.67	100
2)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	592,644,400	528,932,900	89.25	100
1	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	254,629,000	200,342,000	78.68	100
2	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	293,535,000	284,330,500	96.86	100
3	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	44,480,400	44,260,400	99.51	100
	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3,022,765,800	2,730,752,284	90.34	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	492,875,600	491,894,000	99.80	100
2	Penjaminan Ketersediaan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	559,546,600	534,386,778	95.50	100
3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110,000,000	108,971,288	99.06	100
4	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	33,940,000	30,622,500	90.23	100
5	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1,826,403,600	1,564,877,718	85.68	100

j. Tingkat Konsumsi Makan Ikan :

Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sudah melebihi target yaitu 38,5 Kg/kapita/tahun dengan realisasi 39,9 Kg/Kapita/Tahun. Tingkat Konsumsi makan ikan meningkat setiap tahunnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 3.19. Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Dari Grafik diatas terlihat tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat setiap tahunnya dan sudah melebihi target yang sudah ditentukan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan membuat diservikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak-otak ikan. Selain itu dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat Baliho.



Baliho Ayo Makan Ikan





Gambar 3.20. Kegiatan yang mendukung Peningkatan Konsumsi

Tabel 3.12. Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat konsumsi ikan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%Keuangan	%Fisik
1)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	369,979,900	313,928,328	84.85	100
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	254,629,000	200,342,000	78.68	100
1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	254,629,000	200,342,000	78.68	100
	Kegiatan Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	115,350,900	113,586,328	98.47	100
1	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	115,350,900	113,586,328	98.47	100

2) Tabel 3.13. Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2 :							
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN							
NO	Indikator	Target 2019	Realiasi 2019	Target 2020	Realiasi 2020	Target 2021	Realiasi 2021
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	70	69.14	75	67.79	75	63,11

1. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Nilai SAKIP Dinas Perikanan yang di evaluasi oleh Inspektorat adalah SAKIP Tahun 2021. Dari hasil evaluasi Inspektorat tersebut SAKIP Dinas Perikanan mendapat nilai 63,11 dengan kategori B dengan pengertian Baik. Akuntabilitas kinerja sudah baik. memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja. dan perlu sedikit perbaikan. sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai 19,88

- 1) Untuk Komponen Perencanaan Kinerja Khususnya dokumen perencanaan strategis, Dinas Perikanan telah memiliki dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang telah memuat tujuan. indikator tujuan, Sasaran, indikator sasaran dan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan beserta targetnya. Namun tujuan yang dicantumkan belum memiliki indikator tujuan.
- 2) Renstra belum dipublikasikan
- 3) Perencanaan Kinerja telah menyajikan IKU dan telah dipublikas
- 4) Sasaran telah berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
- 5) Target jangka menengah dalam renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tujuan berjalan
- 6) Rencana aksi telah disusun dan mencantumkan target secara periodik atas kinerja namun belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pengornisian kegiatan
- 7) Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala

- 8) Renstra atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala

Tanggapan :

1. Renstra telah dipublikasikan
2. Renstra atas kinerja sudah dimonitor pencapaiannya secara berkala

B. Pengukuran Kinerja dengan nilai 15,31

- 1) Untuk komponen pengukuran kinerja ini, Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota telah mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal sampai pada Eselon III dan IV.
- 2) Pengumpulan data kinerja belum menggunakan mekanisme yang sepenuhnya memadai.
- 3) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala.
- 4) Rencana aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja
- 5) Hasil pengukuran (capaian) kinerja belum dikaitkan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment.

Tanggapan :

1. Rencana aksi sudah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 9,31

- 1) Laporan kinerja belum diunggah kedalam website
- 2) Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumberdaya
- 3) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan dan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Tanggapan :

1. Laporan kinerja belum diunggah kedalam website
2. Laporan kinerja digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

D. Evaluasi Internal dengan nilai 4,05

- 1) Evaluasi program telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya menyajikan data terkait keberhasilan dan kegagalan program
- 2) Evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara maksimal dan dengan mekanisma yang dapat diandalkan.

Tanggapan : Rencana aksi sudah dievaluasi setiap triwulan dan dilaporkan realisasinya

E. Pencapaian Sasaran / Kinerja organisasi dengan nilai 14.56

- 1) Target kinerja secara umum telah tercapai
- 2) Sebagai faktor pendukung tercapainya target kinerja tidak tercapai dan menurun pencapaiannya dibandingkan tahun sebelumnya

Tanggapan : Target kinerja yang tidak tercapai tahun sebelumnya lebih diprioritaskan tahun berikutnya.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan. Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD dan DAK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian Urusan. Organisasi. Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Dinas Perikanan	7.910.663.217	7.327.662.031
3.25.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.584.787.517	3.418.545.219
3.25.XX.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.232.600	48.176.600

Kode Rekening	Uraian Urusan. Organisasi. Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.25.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.481.700	5.478.700
3.25.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.680.000	2.676.000
3.25.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.078.400	2.078.400
3.25.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.109.000	2.102.000
3.25.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.575.000	2.575.000
3.25.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.550.500	31.508.500
3.25.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.758.000	1.758.000
3.25.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.613.967.817	2.578.622.469
3.25.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.605.657.417	2.570.371.069
3.25.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	973.000	966.000
3.25.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.152.000	3.120.000
3.25.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.111.400	2.106.400
3.25.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.074.000	2.059.000
3.25.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.250.000	60.250.000
3.25.XX.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	19.750.000	19.750.000
3.25.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.500.000	40.500.000
3.25.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.266.100	219.046.644
3.25.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.277.000	1.277.000
3.25.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.410.300	49.369.800
3.25.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.622.000	5.620.900
3.25.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.736.300	20.736.300
3.25.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.660.000	3.660.000
3.25.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.967.500	5.966.900
3.25.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.593.000	132.415.744
3.25.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.500.000	11.500.000
3.25.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	11.500.000	11.500.000

Kode Rekening	Uraian Urusan. Organisasi. Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.25.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.380.000	243.357.956
3.25.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000
3.25.XX.20.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	50.300.000	43.782.956
3.25.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	198.580.000	197.075.000
3.25.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.191.000	257.591.550
3.25.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.401.000	212.436.550
3.25.XX.'01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	145.000.000	33.745.000
3.25.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.490.000	2.880.000
3.25.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.300.000	8.530.000
3.25.XX.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	299.170.000	246.184.000
3.25.XX.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.170.000	246.184.000
3.25.XX.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	224.170.000	172.931.000
3.25.XX.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	75.000.000	73.253.000
3.25.XX.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.656.725.800	3.349.004.484
3.25.XX.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	633.960.000	618.252.200
3.25.XX.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	295.944.600	289.661.300
3.25.XX.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan. Bantuan Pembiayaan. Kemitraan Usaha	293.535.000	284.330.500
3.25.XX.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	44.480.400	44.260.400
3.25.XX.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.022.765.800	2.730.752.284
3.25.XX.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	492.875.600	491.894.000
3.25.XX.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	559.546.600	534.386.778
3.25.XX.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	108.971.288

Kode Rekening	Uraian Urusan. Organisasi. Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
3.25.XX.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	33.940.000	30.622.500
3.25.XX.04.2.04.06	Perencanaan. Pengembangan. Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.826.403.600	1.564.877.718
3.25.XX.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	369.979.900	313.928.328
3.25.XX.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	254.629.000	200.342.000
3.25.XX.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	254.629.000	200.342.000
3.25.XX.06.2.03	Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	115.350.900	113.586.328
3.25.XX.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	115.350.900	113.586.328
		7.910.663.217	7.327.662.031

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban *keberhasilan/kegagalan* Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2021, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang

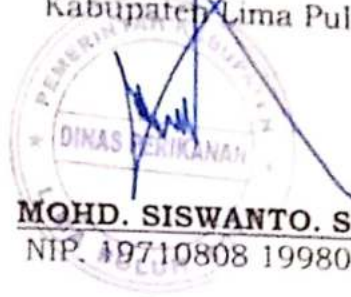
Capaian kinerja tersebut baik berhasil maupun tidak berhasil memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa akan datang.

Demikian Laporan Instansi Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 untuk disampaikan sebagai pedoman selanjutnya. semoga dapat bermanfaat.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Sarilamak. Februari 2023

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota



MOHD. SISWANTO. S.PI. M.Si
NIP. 19710808 199803 1 004